

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Laporan Penelitian, Jurnal

- Amriani, Nurmaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Anton Suyanto, H.R.M, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, kompres MKRI, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H, Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Cet.2, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, M, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Siti, Soemarti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, Yogyakarta.
- Hasan, A. Madje 2009, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Herri Swantoro, H, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Kencana, Depok.
- Ikhwansyah, Isis, 2012, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawina*, Keni Media, Yogyakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nainggolan, Bernard, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung.
- Nurdin, Andriani, 2012, *Kepailitan Bumn Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.
- Pramono, Nindy, 2013, *Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta.
- Pramono, Nindy dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Radjaguguk, Erman, 2001, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Alumni, Bandung.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement verordening Jo. UU No.4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Salim H, S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S, 2010, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Adimata, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siagian, S.P, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sinaga, Syamsudin M, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Cet 1, Tatanusa, Jakarta.
- Soekarmo, Soerjono, 1886, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Suryanto, H.R.M, Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winamo, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- van Apeldom, L.J, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undnag-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.
- Wijayanta, Tata, 2014, Kajian Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yahya, Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zainal Asikin, H, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

## **B. Tesis**

- Safitri Fahriza Nurul, “Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Kasus PT. Istaka Karya (Persero)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tidak dipublikasi, Jakarta, 2012.

Yuristiara Esha, “Pemberesan Harta Pailit Yang Berakhir Dengan Perdamaian (Studi Kasus Kepailitan PT. Spectra Tirtasegara Line)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Tidak dipublikasi, Yogyakarta, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek Voor Indonesie*) (*staatsblaad* No. 23 Tahun 1847).

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 443).

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI No. 73, Tambahan Lembaran Negara No. 3316).

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman (Lembaran Negara RI No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).

Putusan MARI Nomor 124K/PDT.SUS/2011.

Putusan MARI Nomor 142PK/PDT.SUS/201.

### **D. Internet**

Meryana Ester, "Kreditur Berdamai, Istaka Karya Lolos dari Pailit", <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/12/20/1650351/Kreditur.Berdamai.Istaka.Karya.Lolos.dari.Pailit>, Yogyakarta, Diakses Tanggal 28 Juli 2018.

### **E. Wawancara**

Pudjo Hunggul H.W, 2018, ketidakpastian hukum penyelesaian perkara kepailitan bersinggungan dengan tujuan hukum keadilan, *Wawancara*, Semarang, 3 Desember.

Andrey Sitanggang, 2018, ketidakpastian hukum penyelesaian perkara kepailitan karena upaya perdamaian, *Wawancara*, Jakarta, 27 September.